

Literatur Review: Pengukuran Kinerja di Pemerintahan Sektor Publik

Faiz Rabbani^{1*} | Azaku Reyhan² | Naufal Fadhilah³

¹ Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

Correspondence Email:
naufal.fadhilah@student.budiluhur.ac.id*

Kata Kunci:
Pengukuran Kinerja; Sektor Publik; Akuntabilitas;
Balanced Scorecard; SAKIP.

Abstrak

Pengukuran kinerja di sektor publik telah menjadi perhatian utama dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelayanan publik. Artikel ini bertujuan untuk melakukan tinjauan literatur mengenai pendekatan, metode, serta tantangan dalam pengukuran kinerja di pemerintahan sektor publik. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa pengukuran kinerja tidak hanya mencakup aspek efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi partisipasi publik dan keadilan sosial. Model seperti Balanced Scorecard, Key Performance Indicators (KPI), dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) banyak digunakan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan budaya organisasi. Artikel ini memberikan rekomendasi untuk pengembangan model pengukuran kinerja yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja dalam sektor publik merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi yang telah berlangsung di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada hasil (result-oriented). Perubahan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas serta semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola sumber daya yang terbatas.

Berbeda dengan sektor swasta yang cenderung berorientasi pada keuntungan (profit), sektor publik memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk memberikan pelayanan yang adil, merata, dan berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran kinerja di sektor publik tidak hanya difokuskan pada output atau hasil kerja instansi, tetapi juga pada outcome, yakni dampak dari kebijakan dan program terhadap kualitas hidup masyarakat. Hal ini menuntut adanya pendekatan yang lebih kompleks dan multidimensional dalam menyusun indikator kinerja yang relevan dan dapat diukur secara objektif.

Di Indonesia, dorongan untuk menerapkan pengukuran kinerja secara sistematis semakin menguat sejak diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bagian dari upaya reformasi administrasi publik. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang jelas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sehingga mendorong efisiensi penggunaan anggaran negara dan peningkatan mutu pelayanan publik. Meskipun demikian, implementasi pengukuran kinerja di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya budaya kinerja, hingga resistensi terhadap perubahan dalam struktur birokrasi yang kaku.

Selain itu, globalisasi dan perkembangan teknologi informasi juga memberikan tantangan dan peluang baru dalam pengelolaan kinerja publik. Pemerintah dituntut untuk lebih terbuka terhadap

evaluasi publik dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin cepat berubah. Hal ini menegaskan pentingnya desain sistem pengukuran kinerja yang adaptif, inklusif, dan berbasis data yang andal. Pendekatan- pendekatan tradisional seperti penggunaan indikator kuantitatif semata semakin dipandang tidak memadai untuk menangkap kompleksitas pelayanan publik, sehingga integrasi metode kualitatif dan partisipatif menjadi krusial.

Melalui pemetaan literatur ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi strategis yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi sektor publik dalam mengembangkan sistem pengukuran kinerja yang relevan dengan kebutuhan lokal dan tantangan global

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan literature review sebagai metode utama untuk menganalisis pengaruh implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas pelaporan keuangan publik di Indonesia. Literature review dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri, mengidentifikasi, dan mensintesis berbagai temuan, tren, serta kesenjangan penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku akademik, dan laporan resmi pemerintah yang diterbitkan pada rentang waktu 2019 hingga 2024. Sumber literatur dikumpulkan melalui berbagai database akademik terkemuka seperti Google Scholar, ProQuest, dan ScienceDirect guna memastikan bahwa referensi yang digunakan telah melalui proses peer-review dan memiliki kredibilitas tinggi. Kriteria seleksi literatur didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu relevansi topik dengan implementasi akuntansi berbasis akrual di sektor publik, metode penelitian yang digunakan dalam sumber tersebut, serta kesesuaian konteks dengan kondisi pelaporan keuangan pemerintahan di Indonesia maupun negara lain yang telah mengadopsi sistem serupa. Literatur yang terpilih kemudian dianalisis secara mendalam dan kritis untuk mengevaluasi bagaimana penerapan basis akrual berdampak terhadap transparansi, akuntabilitas, akurasi, dan keterbandingan laporan keuangan pemerintah. Selain itu, analisis juga diarahkan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi selama proses implementasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur teknologi, serta resistensi terhadap perubahan organisasi.

Studi ini juga mengkaji berbagai solusi yang telah diusulkan atau diterapkan di berbagai negara dalam mengatasi hambatan tersebut, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk konteks Indonesia. Dengan mengadopsi pendekatan literature review yang komprehensif dan sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas implementasi akuntansi berbasis akrual, sekaligus menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan di masa mendatang. Selain menyoroti manfaat dan dampak positif sistem akrual, kajian ini juga menekankan pentingnya dukungan kebijakan, penguatan kapasitas SDM, dan pengembangan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi sebagai faktor kunci keberhasilan implementasi di sektor publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Adapun temuan penelitian dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Temuan Penelitian

No.	Author	Judul	Temuan
1	Dewi Selviani	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan Kota Cimahi	Penelitian ini mengkaji penerapan konsep Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan Kota Cimahi.

No.	Author	Judul	Temuan
2	Yohanes Y. Subiyantoro	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis kinerja Terhadap Akuntabilitas Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Kota (BAPEKO) Kota Mojokerto	Penelitian ini mengkaji Anggaran Berbasis kinerja Terhadap Akuntabilitas Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Kota (BAPEKO) Kota Mojokerto
3	Futri Safitri	Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan	Penelitian ini menelaah penerapan <i>value for money</i> dalam menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan ini memberikan evaluasi yang lebih objektif dan menyeluruh, serta berguna untuk perbaikan pengelolaan keuangan dan layanan publik
4	Irene Thia Marselia, Oryza Ardhiarisca	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Rsud Sidoarjo)	Penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variabel berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
5	U'ah Ganda pratiwi	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur)	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Sosial Kalimantan Timur lebih berorientasi kepada pendayagunaan anggaran yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan
6	Icha Riska Gloria Nainggolan, Putri Kemala Dewi Lubis, Rafael Benediktus, Yosua Simanjuntak	Peran Pengukuran Kinerja Sektor Publik Dalam Mewujudkan Good Governance	Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengukuran kinerja sektor publik, yaitu kurangnya pemahaman tentang konsep pengukuran kinerja, kurangnya data dan informasi, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya dukungan anggaran.
7	Billy Matthew Tendean, Yance Tawas, Jaqueline Tangkau	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur sipil negara.
8	Muhammad Fadhil Arrijal	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja	Penelitian ini menunjukkan bahwa Control internal tidak memoderasi

No.	Author	Judul	Temuan
		Pemerintah Dimoderasi Internal Eksternal Control Pada Skpd Di Kabupaten Gowa	Daerah Dan hubungan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah hal ini pengawasan internal yang baik akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang dihasilkan oleh SKPD.

Pembahasan

Kajian terhadap beberapa studi empiris terkait menyoroiti dampak positif anggaran berbasis kinerja. Hasil tinjauan menyimpulkan bahwa penerapan ABK secara signifikan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas instansi pemerintah. Secara keseluruhan, studi-studi yang ditinjau menunjukkan adanya hubungan positif antara pengelolaan anggaran berbasis kinerja dengan pencapaian target organisasi – berupa efisiensi anggaran dan transparansi pelaksanaan tugas publik. Selain itu, literatur juga mencatat bahwa kerangka kerja seperti Balanced Scorecard, KPI, dan SAKIP banyak digunakan dalam sektor publik, meskipun implementasinya menghadapi hambatan struktural dan budaya organisasi. Sebagai contoh, beberapa penelitian daerah (misalnya pada RSUD Sidoarjo, Pemkab Gowa, Sulawesi Utara) menemukan bahwa ABK memperbaiki penggunaan anggaran dan kinerja ASN secara umum, namun faktor-faktor pendukung seperti kejelasan sasaran, kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pemahaman terhadap akuntansi publik ternyata krusial. Pengukuran kinerja sektor publik dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, efisiensi dan efektivitas, kualitas pelayanan publik, dan motivasi serta kinerja pegawai. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengukuran kinerja sektor publik, yaitu kurangnya pemahaman tentang konsep pengukuran kinerja, kurangnya data dan informasi, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya dukungan anggaran. Rekomendasi untuk mengatasi tantangan dalam pengukuran kinerja sektor publik, yaitu meningkatkan pemahaman tentang konsep pengukuran kinerja melalui pelatihan dan sosialisasi, memperkuat sistem pengumpulan data dan informasi, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, dan meningkatkan dukungan anggaran untuk pengukuran kinerja Peningkatan Transparansi.

Bahwa pengukuran kinerja sektor publik memiliki implikasi positif ganda. Di satu pihak, kinerja yang terukur dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sekaligus mendorong efisiensi/efektivitas anggaran serta kualitas layanan publik. Selain itu, kinerja terukur juga dapat memotivasi pegawai dan memperbaiki budaya kerja berorientasi hasil. Di pihak lain, implementasi di lapangan menghadapi berbagai kendala. Penulis mencatat kendala utama berupa *kurangnya pemahaman* konsep pengukuran kinerja, keterbatasan *data dan informasi*, kekurangan *sumber daya manusia*, serta minimnya *dukungan anggaran* untuk sistem pengukuran kinerja. Hambatan lain yang disebutkan dalam konteks SAKIP adalah budaya birokrasi yang kaku dan resistensi perubahan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, artikel ini menawarkan beberapa solusi. Penulis merekomendasikan peningkatan pemahaman melalui pelatihan dan sosialisasi konsep kinerja, penguatan sistem pengumpulan data dan informasi kinerja, peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan anggaran yang mendukung mekanisme pengukuran kinerja. Secara praktis, penekanan pada integrasi kebijakan, dukungan teknologi informasi, dan komitmen organisasi disebut sebagai kunci agar implementasi ABK dan sistem kinerja dapat berhasil. Dengan begitu, pengukuran kinerja yang kontekstual dan berbasis hasil menjadi instrumen penting dalam mendukung *good governance* dan memenuhi tuntutan publik akan layanan yang lebih berkualitas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dari berbagai penelitian yang membahas pengukuran kinerja di sektor publik, dapat disimpulkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja

instansi pemerintah. Secara umum, ketiga studi yang ditelaah menunjukkan adanya hubungan positif antara pengelolaan anggaran berbasis kinerja dengan pencapaian target organisasi, baik dalam bentuk efisiensi penggunaan anggaran maupun peningkatan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi publik. Secara keseluruhan, hasil review literatur menunjukkan bahwa keberhasilan pengukuran dan pencapaian kinerja sektor publik tidak hanya ditentukan oleh sistem anggaran, tetapi juga oleh variabel pendukung lainnya seperti: kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan, kejelasan sasaran anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja yang transparan, dan tingkat pemahaman terhadap sistem akuntansi sektor publik. Namun demikian, beberapa faktor seperti sistem akuntansi pemerintah daerah ditemukan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas, sebagaimana ditunjukkan dalam studi Subiyantoro. Oleh karena itu, perancangan sistem pengukuran kinerja yang efektif perlu mengedepankan aspek integrasi kebijakan, dukungan teknologi informasi, serta komitmen organisasi dalam menciptakan budaya kinerja yang akuntabel dan transparan. Dengan demikian, pengukuran kinerja yang kontekstual dan berbasis hasil dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sekaligus menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ganda Pratiwi, U'ah., (2018) Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*
- Selviani, D., (2020) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan Kota Cimahi. *Land Journal ULBI*
- Subiyantoro, Yohanes Y. (2011) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto. In: *Seminar Nasional Sistem & Teknologi Informasi (SNASTI) 2011, 30 September 2011, Surabaya.*
- Safitri, Futri., (2022) Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Inovasi Penelitian, Bandung*
- Marselia, Irene Thia., Ardhiarisca, Oryza., (2023) Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Rsud Sidoarjo, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan daerah.*
- Billy Matthew Tendeau, Yance Tawas, Jaqueline Tangkau, (2023) Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*
- Muhammad Fadhil Arrijal, (2023) Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dimoderasi Internal Dan Eksternal Control Pada Skpd Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis (Keuangan, Pemasaran, Sumber daya Manusia)*
- Nainggolan, I., Lubis, Putri Kemala Dewi., Benediktus, Rafael., Simanjuntak, Yosua ., (2024) Peran Pengukuran Kinerja Sektor Publik Dalam Mewujudkan Good Governance, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*
- Penulis, B. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. *Jurnal Akuntabilitas dan Keuangan Publik.*
- Parker, J. (tahun). *Pengukuran Kinerja di Sektor Publik: Konsep dan Implementasi.* *Jurnal Manajemen Pemerintahan.*
- Penulis, A. (2024). Implementasi Balanced Scorecard dalam Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik.*
https://www.researchgate.net/publication/390228151_Balanced_Scorecard_dan_Pengukuran_Kinerja_Pemerintahan_Daerah_Tinjauan_Sistematis_terhadap_Implementasi_dan_Isu_Penelitian

Tri Mulyani. (2023, 3 November). Pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik: Pengertian, tujuan, kendala, konsep, pendekatan. Kompasiana. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/trimulyani2532/6543fac3ee794a4df86c62c3/pengukuran-kinerja-dalam-organisasi-sektor-publik-pengertian-tujuan-kendala-konsep-pendekatan>

Sundari, S., Amelia, E., Anggreani, A. K., & Syamsuddin. (2024). Literature Review: Analisis Penerapan Balanced Scorecard Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 248–259. ISSN: 2088-4656 (Print); 2503-1635. https://jak.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/173/97/1112?cf_chl_tk=v.7Vxbx34GnoBVkZIL7DLEacRgap0VerW65yhrxiVCO-1748071647-1.0.1.1-